



HARYANTO, SE Dorong Inventarisasi Aset, Beri Manfaat ke Masyarakat



YOGYA (KR) - Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Haryanto SE, mendorong sekaligus mendukung upaya inventarisasi aset yang tengah dilakukan tim eksekutif. Status aset atau barang milik daerah yang jelas dinilai akan mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

Haryanto mengungkapkan, inventarisasi aset merupakan bagian dari standarisasi barang milik daerah. "Dari proses inventarisasi itu kita bisa mengetahui kondisi faktual saat ini seperti apa, pemanfaatannya bagaimana serta apa yang dibutuhkan agar pemanfaatannya bisa optimal untuk masyarakat. Kami juga sudah mengundang beberapa mitra kerja terkait hal tersebut," ungkapnya, Minggu (23/2).

Menurutnya, standarisasi barang milik daerah yang diawali dengan inventarisasi melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Meski proses pendataan dan pencatatan berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) namun OPD lain yang terkait juga harus terlibat. Seperti pengelolaan aset berupa jalan maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) dan Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang (Dispetaru) juga ikut terlibat. Hal ini karena DPUPKP memiliki kewenangan dalam hal pemeliharaan jalan serta Dispetaru melakukan pensertifikatan jalan.

"Tertib administrasi perihal aset ini juga menjadi rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti kemarin ada pensertifikatan jalan oleh Dispetaru karena rekomendasi dari BPK akibat belum sesuai sama data yang dari DPUPKP dan Bagian Aset. Ini baru aset jalan, sementara kan masih banyak aset potensial lainnya yang sama-sama harus melibatkan lintas OPD," ura anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Oleh karena itu, Haryanto melalui Komisi A akan memastikan betul upaya inventarisasi dilakukan secara menyeluruh guna menertibkan status barang milik daerah. Dari aspek ketertiban tersebut maka aset milik daerah dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Selain itu dengan intervensi yang tepat maka aset daerah dapat dikelola untuk kemanfaatan masyarakat Kota Yogyakarta.

Seperti halnya rencana pemeliharaan insidental yang akan menyasar Wisma PSIM, Terminal Giwangan sisi selatan maupun gudang Pemkot. Kegiatan tersebut bisa dilakukan karena status aset sudah jelas kepemilikannya serta manfaatnya untuk kepentingan publik. Siapa yang berwenang dan bertanggungjawab atas pemeliharaan serta pengelolaannya juga sudah dipastikan.

Selain itu, inventarisasi aset bahkan bisa menutup celah kebocoran pendapatan asli daerah. Terutama dari sektor penyewaan aset barang milik daerah yang dikelola oleh pihak lain. "Boleh jadi ada aset potensial milik Pemkot yang disewa pihak ketiga namun tarif atau retribusinya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Sehingga kami di Komisi A juga bisa memberikan rekomendasi ke komisi lain terkait," tandasnya. (Dhi)-f



KPR: Andri / Haradan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005